



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025



KECAMATAN DUMOGA BARAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

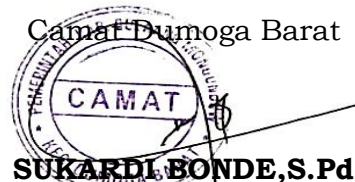
KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dumoga Barat sebagai salah satu bentuk Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan sepanjang tahun 2025. LAKIP ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dan merupakan capaian kinerja tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026. Banyak hal yang masih perlu diperhatikan terutama dalam hal permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi oleh seluruh jajaran di lingkungan pemerintahan Kecamatan Dumoga Barat.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran di Kecamatan Dumoga Barat, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada khususnya.

Doloduo, Januari 2026

Camat Dumoga Barat



SUKARDI BONDE, S.Pd

Nip. 19690930 199103 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Kecamatan Dumoga Barat	1
B. Aspek Strategis Organisasi	3
C. Permasalahan Utama berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dumoga Barat.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaann Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja.....	9
C. Indikator Kinerja Utama.....	9
D. Rencana Kerja Tahunan.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	24
A. Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Saran dan Tindak lanjut 26	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DUMOGA BARAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Dumoga dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Kecamatan merupakan Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Kecamatan Dumoga Barat mempunyai fungsi

- a. Pemberian pelayanan kepada masyarakat
- b. Pelaksanaan Teknis kewajiban kewilayahan atas kebijakan Pemerintah Daerah di Wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pembinaan kewilayahan di wilayah kerjanya;
- d. Penyusun Program dan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- e. Penyiapan Data informasi mengenai potensi/profil Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan seluruh instansi pemerintah, Kelurahan dan Desa;
- g. Pembinaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Desa
- h. Penyelenggaraan Urusan sekretariat kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Camat dibantu oleh :

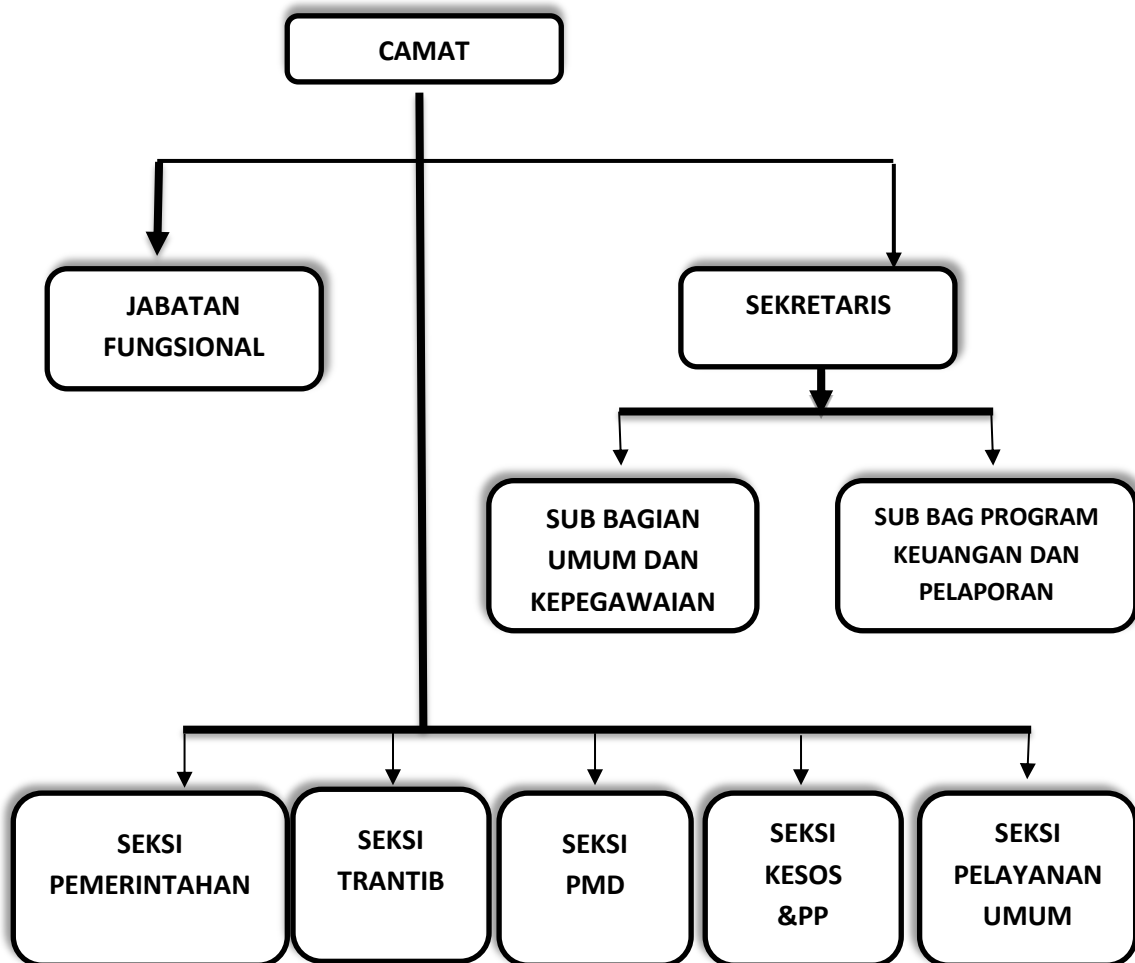
- a. Sekretaris Kecamatan,
- b. Seksi Pemerintahan,
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban,
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan,

f. Seksi Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Struktur Organisasi Kantor Camat Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2025, sebagai berikut :

• Camat	Eselon III/a
• Sekretaris Camat	Eselon III/b
• Kepala Seksi Pelayanan Umum	Eselon IV/a
• Kepala Seksi Pemerintahan	Eselon IV/a
• Kepala Seksi PMD	Eselon IV/a
• Kepala Seksi Kesos dan PP	Eselon IV/a
• Kepala Seksi Trantib	Eselon IV/a
• Kasubag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV/b
• Kasubag Program, Keuangan & Pelaporan	Eselon IV/b

Kantor Camat Dumoga Barat mempunyai personil sebanyak 15 orang dan THL 3 Orang yang terdiri dari :

Golongan IV/b	= 1 Orang
Golongan III/d	= 4 Orang
Golongan III/c	= 2 Orang
Golongan III/b	= 2 Orang
Golongan III/a	= 3 Orang
Golongan II/c	= 2 Orang
Golongan II/b	= 1 Orang
Tenaga Harian Lepas	= 3 Orang

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan Dumoga Barat sangat penting keberadaannya untuk masyarakat, hal ini disebabkan karena Kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan Dumoga Barat merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Lingkungan Stratejik Kecamatan Dumoga Barata dalah sebagai berikut :

a. Geografis

Kecamatan Dumoga Barat merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga dimulai tahun 1954 dipimpin oleh Ismail Damopolii sebagai Mayor Kadato, Tahun 2004 disebut Kecamatan Dumoga Barat sebagai hasil pemekaran dari satu kecamatan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi tiga Kecamatan dimana pada waktu itu Kecamatan Dumoga memiliki 23 Desa.. Batas geografis kecamatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Dumoga Utara
- Sebelah Timur : Dumoga Tengah
- Sebelah Selatan : Bolaang Mongondow Selatan
- Sebelah Barat : Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Desa Doloduo yang menjadi Ibu kota dari Kecamatan Dumoga Barat dapat diakses dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) dengan waktu tempuh $\pm$ 5 Jam dan berjarak 300 Km. Sementara bila di akses dari Kabupaten Bolaang Mongondow (Lolak) hanya berjarak 111 Km dengan waktu tempuh kurang dari 2 Jam.

Topografi Kecamatan Dumoga Barat banyak jalan rusak dan bergelombang di areal atau lokasi pegunungan sehingga bila musim hujan sering terjadi longsor dan banjir.

Luas Kecamatan Dumoga Barat keseluruhannya mencapai 351 Km², Desa dengan luas terbesar adalah desa Ikhwan yaitu seluas 108,23 Km², sedangkan Desa yang memiliki luas terkecil adalah desa Doloduo I yaitu hanya seluas 0,42 km².

b. Kependudukan

Keadaan penduduk di Kecamatan Dumoga Barat pada tahun 2024 sebanyak 18.027 jiwa yang terdiri dari Laki laki sebanyak 9.481 jiwa dan Perempuan sebanyak 8.726 jiwa.

c. Sosial Politik

Perubahan peta politik Nasional telah membawa dampak terbukanya kran Demokrasi dan kebebasan bagi rakyat. Berkembangnya tuntutan dinamika dan aspirasi masyarakat saat ini adalah merupakan pemicu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas Pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik –

baiknya dan dapat semudah mungkin dijangkau masyarakat.

Perubahan lingkungan seperti diuraikan diatas, menuntut manajemen organisasi Kecamatan Dumoga Barat mengubah logika yang dipakai sebagai dasar menjalankan roda organisasinya. Pengetahuan manajemen berkembang melalui proses pergeseran paradigma yaitu manajemen tradisional, bergeser kepada paradigma baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

d. Industri dan Perdagangan

Aktivitas perdagangan di pasar berada di Desa Doloduo dan Ikwan ini merupakan pasar yang sudah cukup lama di kecamatan ini.

C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DUMOGA BARAT

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Dumoga Barat menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan OPD dalam merumuskan usulan Desa yang disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan.
2. Meningkatkan optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Masyarakat.
3. Perlu adanya Pendidikan lanjutan, Kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, sehingga dapat menghasilkan aparatur yang kreatif dan inovatif.
4. Perlunya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di setiap Desa bersama Aparat terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah:

**“BOLAANG MONGONDOW YANG BARU, BERBUDAYA, BERDAYA SAING
DAN MANDIRI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN INDONESIA TIMUR”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui 5 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan bebas KKN;
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur;

Kecamatan Dumoga Barat sesuai tugas dan fungsinya mendukung misi ke 4 yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.

Dan mendukung Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Visi dan Misi Kecamatan Dumoga Barat

Untuk mendukung Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow maka Kecamatan Dumoga Barat menetapkan :

Visi :

“Bolaang Mongondow yang Baru, Berbudaya, Berdaya saing dan Mandiri sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kecamatan Dumoga Barat menetapkan misi sebagai berikut : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan bebas KKN”

3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dumoga Barat

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Kecamatan Dumoga Barat

Sasaran: Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dumoga Barat

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke.			
						2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah	57,09			75	75	90	95
			58,6	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	63	70	73	78

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut komitmen Kecamatan Dumoga Barat untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Dumoga Barat tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumoga Barat tahun 2025 :

Revisi Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	73	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.848.503.267.-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 11.916.000.-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Dumoga Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Hasil Penelitian Kemenpan RB	73

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT TA. 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Kecamatan Dumoga Barat

yang dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Kecamatan Dumoga Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	73

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Kecamatan Dumoga Barat, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85 = Sangat berhasil

$70 < X \leq 85$ = Berhasil

$55 < X \leq 70$ = Cukup Berhasil

≤ 55 = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”.

Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran=	
	Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Dumoga Barat terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran . diketahui bahwa tujuan dari pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan sosial kemasyarakatan adalah dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Dumoga Barat dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Uraian dan analisis capaian kinerja masing- masing sasaran kecamatan dumoga barat adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan

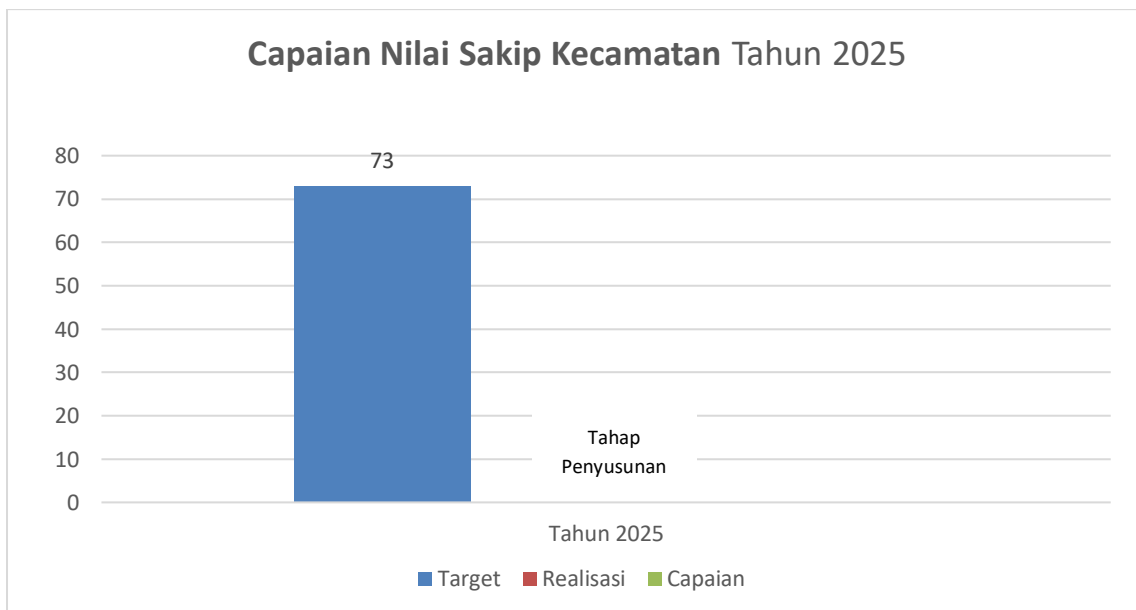
Pengukuran tingkat capaian sasaran “Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan” dengan indikator sasaran “Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah” dilakukan melalui penilaian menyeluruh dari peningkatan kinerja pemerintah kecamatan. SAKIP merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Sehingga peningkatan kinerja sangat berhubungan dengan tingkat pelayanan publik dari suatu instansi khususnya menyangkut urusan kewilayahan (kecamatan). Dalam penghitungan nilai sakip didasarkan pada penilaian yang dilaksanakan oleh tim evaluator sakip pemerintah yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Sehingga untuk penentuan formula didasarkan dari nilai LHE tim evaluator.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Dumoga Barat tahun 2025

Tabel 3.1
Capaian Nilai Sakip Kecamatan Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	73	Dalam tahap Penyusunan	0

Nilai Sakip Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Dumoga Barat pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaiannya



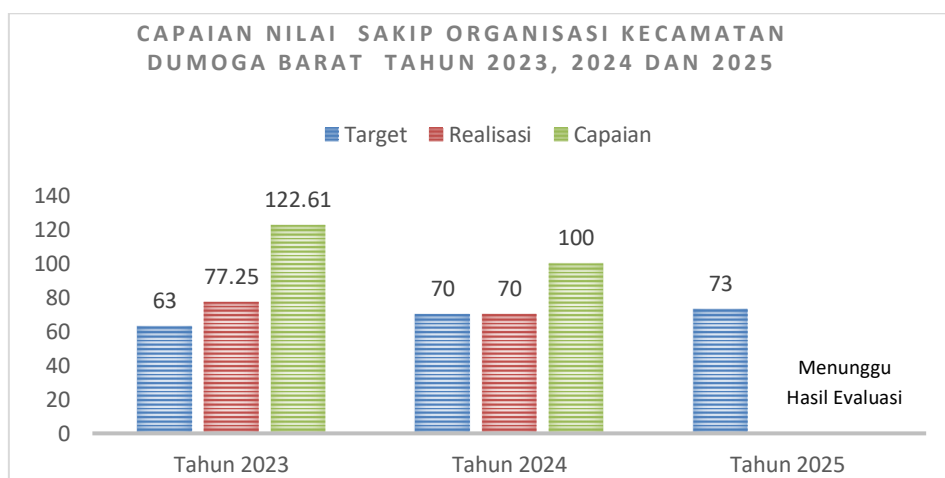
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Tabel 3.2

Capaian Nilai Sakip Kecamatan Tahun 2023 - 2025

	INDIKATOR	2023			2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Nilai Sakip Organisasi PD	63	77,25	122,61	70	70	100	73	Menunggu Hasil Evaluasi	0	78

Nilai Sakip Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2025 belum bisa diukur, sehingga capaian Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan Dumoga Barat pada Tahun 2025 belum dapat disimpulkan pencapaiannya. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dumoga Barat Tahun 2024 menunjukkan nilai 70 dengan Predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Dumoga Barat “Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik”. Pada Tahun 2023 Kecamatan Dumoga Barat memperoleh Nilai 77,25 atau Predikat BB Sangat Baik.



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja **Nilai Predikat Sakip Organisasi Perangkat Daerah** Tahun 2021 -2025

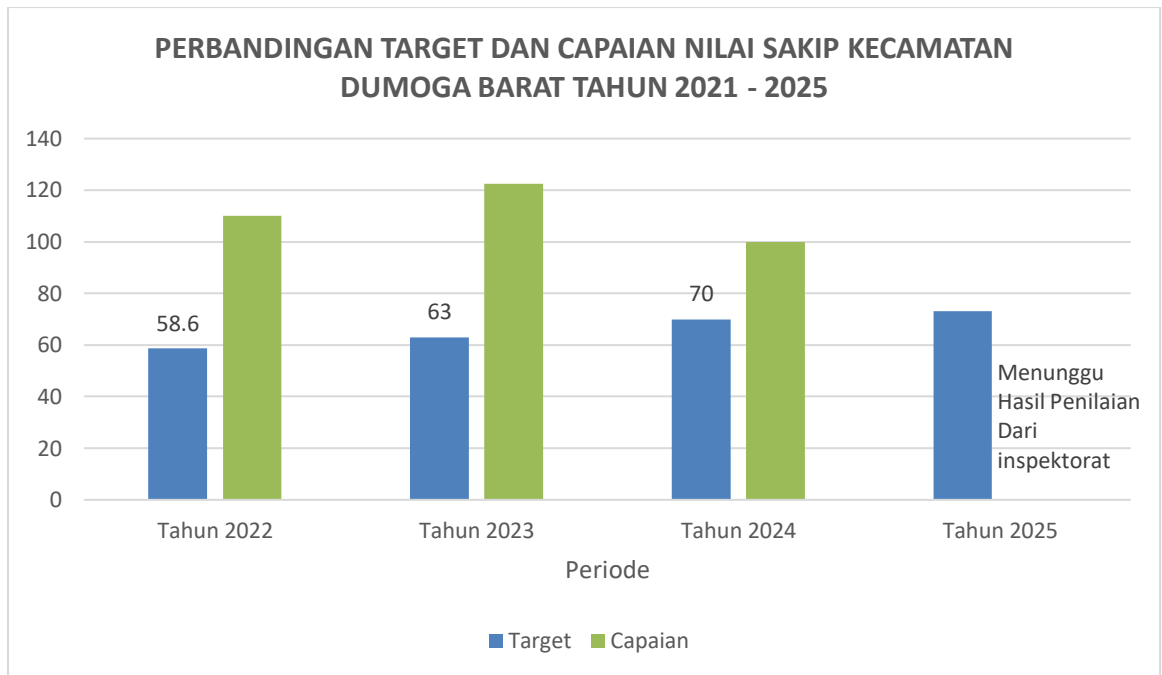
berdasarkan Target Akhir Renstra secara rinci dapat diuraikan pada table berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	63,84	64,56	77,25	70	Menunggu Hasil	78

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan menteri tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

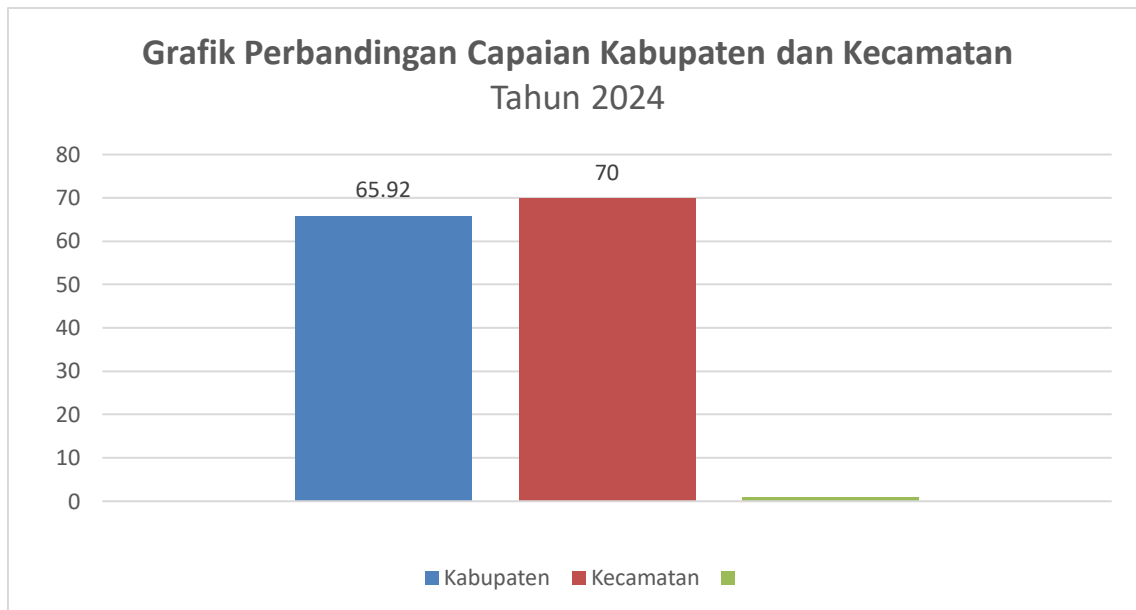
- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Kecamatan Dumoga Barat masih dalam tahap Penyusunan.
- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Kecamatan Dumoga Barat berhasil meraih Nilai 70 dengan predikat “B”.
- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Kecamatan Dumoga Barat berhasil meraih Nilai 77,25 Dengan Predikat “BB”
- Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Dumoga Barat berhasil meraih Nilai 64,56 Dengan Predikat “B”



4. Mebandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional (Jika ada)

Adapun perbandingan Capaian dengan standar Kabupaten yang ada dapat kita lihat pada tabel berikut :

Instansi	Nilai
Kabupaten	65,92
Kecamatan	70,00



5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Hasil Evaluasi mengacu pada tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,89
2	Pengukuran Kinerja	30	18,78
3	Pelaporan Kinerja	15	11,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Rekomendasi :

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam hasil evaluasi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- a. Komponen Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - Menyampaikan Dokumen crosscutting Perangkat Daerah
 - Melaksanakan rapat pembahasan terkait perumusan dan penyusunan perencanaan kinerja internal Perangkat Daerah.
 - Melaksanakan pemantauan berkala atas Rencana Aksi dalam rangka perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang lebih baik.
- b. Komponen Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
 - Menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja internal Perangkat Daerah baik berupa SK dan/atau SOP
 - Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit kerja secara berkala sampai pada level bawah secara berjenjang sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan dan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
 - Menyusun Dokumen Laporan Kinerja pada website Perangkat Daerah
 - Melaksanakan Rapat internal Perangkat Daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dan digunakan sebagai dasar penyesuaian aktifitas dan anggaran dalam mencapai target kinerja Perangkat Daerah ditahun berikutnya.
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal pada perangkat daerah secara berjenjang
 - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah
 - Melaksanakan rapat internal perangkat daerah pembahasan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kinerja
- e. Menyampaikan bukti tindak lanjut dan Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut kepada Tim Evaluator AKIP INSpektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Dalam Proses Penyusunan	94,32%	-

Target Efisiensi Pada Indikator Capaian Kinerja dalam proses penyusunan dan capaian Realisasi Anggaran Sebesar 94,32 %.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- II. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dumoga Barat pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Dumoga Barat memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Kecamatan Dumoga Barat pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.860.419.267,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.754.694.519,00 atau 94,32%, sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.795.970.005,00, Belanja modal yang dikelola Kecamatan Dumoga Barat pada tahun anggaran 2024 tidak ada.

Untuk lebih jelasnya besar anggaran dan realisasi APBD Kecamatan Dumoga Barat pada Tahun Anggaran 2025 dan perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	1.860.419.267	1.754.694.519	94.32	1.795.970.005,00
5.1	BELANJA OPERASIONAL	1.831.004.267	1.726.034.519	94.27	1.795.970.005,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.583.037.635	1.488.335.641	94.02	1.601.137.489,00
5.1.2	Belanja Barang/Jasa	247.966.632	237.698.878	95.86	194.832.516,00
5.2	BELANJA MODAL	29.415.000	28.660.000	97.43	00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.415.000	28.660.000	97.43	00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	00	00	0	00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	1.860.419.267	1.754.694.519	94.32	1.795.970.005,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.860.419.267)	(1.754.694.519)	94.32	(1.795.970.005,00)

2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Capaian kinerja realisasi anggaran program / kegiatan / sub kegiatan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Program Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.848.503.267	1.742.844.519	94.28
• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.607.238.856	1.510.803.117	94
• Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.574.037.635	1.481.085.641	94.09
• Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	27.246.404	25.492.708	94
• Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.954.817	4.224.768	70.94
• Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	13.320.000	11.988.000	90
• Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	13.320.000	11.988.000	90
• Administrasi umum perangkat daerah	89.385.110	88.289.710	98.77
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.777.110	1.777.110	100
• Fasilitasi kunjungan tamu	4.500.000	4.060.000	90.22
• Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	83.108.000	82.452.600	99.21
• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.415.000	28.660.000	97.43
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.415.000	28.660.000	97.43

• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahn Daerah	75.612.826	71.518.092	94,58
• Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12.599.728	8.568.092	68
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.013.098	62.950.000	99.92
• Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	33.531.475	31.585.600	94.19
• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33.531.475	31.585.600	94.19
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.916.000	11.850.000	99.44
• FAsilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	11.916.000	11.850.000	99.44
• Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	11.916.000	11.850.000	99.44
BELANJA	1.860.419.267	1.754.694.519	94.32

3. Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

I. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
Capaian target kinerja keuangan 96,56% tidak ada permasalahan karena kebutuhan gaji sesuai yang dianggarkan.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
Capaian target kinerja Keuangan 94 tidak ada permasalahan karena pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan yang dianggarkan.
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Capaian target kinerja Keuangan 70.94% Permasalahan karena cetak spanduk berkurang, Solusinya untuk merasionalisasikan kembali perencanaan Belanja Cetak.

2. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
Capaian kinerja keuangan 90 % tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.

3. *Administrasi umum perangkat daerah*

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Capaian kinerja keuangan 100% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.
- Fasilitasi kunjungan tamu
Capaian kinerja keuangan 90,22 % tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Capaian kinerja keuangan 99,21% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan.

4. *Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Capaian kinerja keuangan 97,43% tidak ada permasalahan karena penyerapan anggaran sesuai yang dibutuhkan.

5. *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Capaian kinerja keuangan 68 % permasalahan pembayaran listrik untuk tahun ini berkurang dibandingkan Tahun 2024 karena Tahun 2025 mendapatkan subsidi dari Pemerintah, Solusinya untuk merasionalisasikan kembali perencanaan Belanja Listrik.
- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
Capaian kinerja keuangan 99,92 % tidak ada permasalahan karena penyerapan anggaran sesuai yang dibutuhkan.

6. *Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Capaian kinerja keuangan 94,19% tidak ada permasalahan karena sesuai dengan kebutuhan.

II. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan :

1. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
Capaian kinerja keuangan 99,44 % tidak ada permasalahan karena sesuai dengan yang dianggarkan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Kecamatan Dumoga Barat 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana uraian pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran Kecamatan Dumoga Barat pada tahun 2025 pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan Masih menunggu Hasil, Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja Kecamatan Dumoga Barat pada tahun 2025 adalah mencapai 94,32 %.

Berbagai pelaksanaan program yang dilakukan pada TA. 2025 ini merupakan hasil dari penyusunan program yang telah melibatkan berbagai stakeholders. Penyusunan program dan pelaksanaannya tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis Kecamatan Dumoga Barat 2023 – 2026 sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Dumoga Barat tahun 2023-2026.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi pemerintah kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Dumoga Barat pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2023 s.d 2026.
2. Mengevaluasi Program dan Kegiatan yang belum terimplementasi secara maksimal untuk dilakukan perbaikan antara lain mengkoordinasikan ke pihak terkait.
3. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah Kecamatan Dumoga Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Dumoga Barat yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2023- 2026.
5. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi

